BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan jelas dalam suatu perusahaan, baik dari sisi jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan. Memperoleh laba adalah tujuan utama jangka pendek perusahaan sedangkan jangka panjangnya adalah dengan memberikan kemakmuran baik bagi pemilik perusahaan ataupun pemegang saham dan membuat nilai perusahaan tercermin secara maksimal pada harga saham perusahaan. Pergerakan harga saham pada perusahaan yang sedang terjadi di bursa efek indonesia dapat menjadi bahan penilaian bagi penilaian investor. Tetapi pada kenyataannya, banyak investor keliru dan mengalami kesulitan mengambil keputusan dalam memprediksi nilai perusahaan. Acuan utama penyebabnya adalah harga saham suatu perusahaan setiap saat dapat mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan.

Meningkatnya nilai perusahaan yaitu dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan komponen lainnya termaksud para pemegang saham maupn pemangku kepentingan pada pembuatan keputusan dengan tujuan memaksimalkan modal perusahaan. Hanya saja, akan timbul konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen pada saaat perusahaan biasanya sedang dalam meningkatkan nilai perusahaan. Istilah tersebut dinamakan *agency problem* yang akan menyebabkan timbulnya konflik keagenan *(agency conflict.* Biaya keagenan adalah menurunnya nilai perusahaan yang merupakan suatu indikasi adanya masalah keagenan dan tujuan awal dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan maka biaya keagenan harus menurun agar meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang tercermin dari harga saham perusahaan. Kondisi perusahaan seperti halnya laporan kinerja, pembagian dividen, perubahan strategi perusahaan atau keputusan strategi dalam Rapat Umum Pemegang Saham akan menjadi informasi bagi para

investor. Informasi ini akan mempengaruhi persepsi investor yang akhirnya akan berdampak pada nilai perusahaan (Pertiwi, 2016).

Hartono M (2015) mengatakan bahwa ada nilai buku, nilai pasar, dan intrinsik nilai merupakan tiga jenis penilaian terkait dengan saham. Investor perlu untuk mengetahui dan mengerti tiga jenis nilai saham sebagai informasi penting dalam membuat keputusan untuk mengivestasi saham pada perusahaan yang ingin dituju, karena hal tesebut dapat membantu investor untuk mengetahui saham mana yang sedang berkembang dan murah. Salah satu yang dapat menentukan nilai intristik saham ialah *Price to Book Value (PBV)*. *PBV* menunjukan hubungan antaran harga pasar dengan nilai buku per saham, hal yang bisa investor pertimbangakan adalah rasio pasar modal serta rasio *PBV* untuk mengetahui dimana perbedaan harga saham yang masuk akal, terlalu tinggi *(overvalued),* atau terlalu rendah *(undervalued).* Saham yang memiliki *PBV* rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi disbanding dengan saham yang memiliki *PBV* tinggi karena PBV memiliki hubungan negatif dengan return saham. Berikut *PBV* pada Sub Sektor Keungan periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 1.1

***PBV* pada Sub Sektor Keuangan**

No	Sub Sektor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank	1,67	1,62	1,45	2,27	2,42
2	Lembaga Pembiayaan	1,21	1,37	1,04	1,65	2,56
3	Perusahaan Efek	1,16	1,33	2,68	3,23	1,92
4	Asuransi	1,25	1,62	2,04	3,57	2,66

Sumber : www.idx.com

Tabel 1.1 memperlihatkan data nilai perusahaan yang diukur dengan *PBV* setiap sub sector keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019.

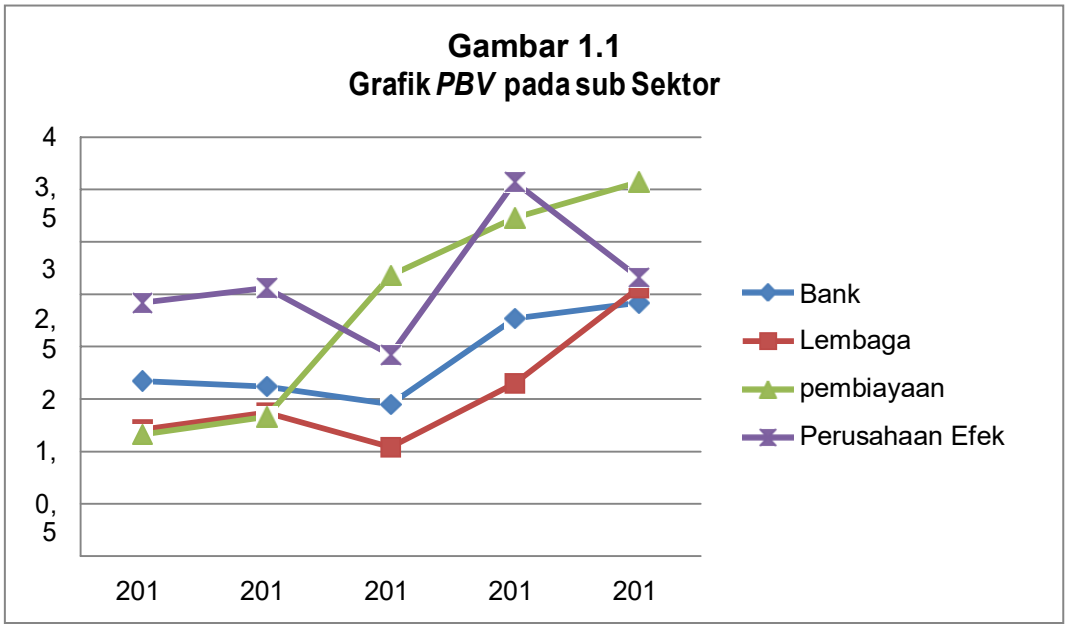

Gambar 1.1 menunjukan adanya penurunan dan peningkatan *PBV* pada sub sector keuangan diantaranya, Bank, Lembaga pembiayaan, Perusahaan Efek, dan Asuransi. Selanjutnya, adanya peningkatan bagaimana diperlihatkan penurunan dan peningkatan *PBV* pada sub sektor Keuangan. Kemudian akan ditunjukan lebih jelas peningkatan dan penurunan nilai perusahaan dengan melihat persentase PBV dari setiap subsektor keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015 sampai dengan 2019 pada table 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Persentase Peningkatan dan Penurunan *PBV* pada Subsektor Keuangan

No.	Sub Sektor	Tahun					Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bank	-13%	-3%	-10%	56,6%	1,3%	6,3%
2	Lembaga Pembiayaan	426,1 %	13,2 %	24,1%	58,6%	55,1%	115,4 %
3	Perusahaan Efek	-49,6%	14,7 %	101,5 %	20,5%	-40,6%	9,3%
4	Asuransi	9,6%	29,6 %	25,9%	75,0%	25,5%	33.1%

Terlihat pada tabel 1.2 ditunjukan adanya perubahan naik turun PBV yang terjadi di *sub sector* keuangan periode 2015-2019. Dapat ditinjau dari rata-ratanya per *sub sector*, bahwa Lembaga Pembiayaan mengklaim peningkatan rata-rata PBV tertinggi mencapai 115.4%, hal tersebut dapat dilihat bahwa pada lembaga pembiayaan dari tahun 2015 sampai 2019 semakin meningkat nilai perusahaanya, kemudian disusul oleh Asuransi mencapai rata-rata PBV sebesar 33,1% dan Perusahaan Efek mendapat rata-rata sebesar 9,3%. Lain halnya *sub sector* yang mendapat PBV terendah dengan rata-rata PBV sebesar 6,3% yaitu Bank. Hal ini dipicu karena dari tahun 2015 sampai 2019 sub sector perbankan lah yang paling tidak stabil dari yang tahun 2015 samapi 2017 mengalami penurutran ektrem dan tahun 2018 adanya peningkatan ektrem dan 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Berikut fenomena-fenomena beberapa bank yang menjadi pemicu terjadinya penurunan nilai perusahaan perbankan, di antaranya :

Pada tahun 2017, rata-rata nalai GCG industri perbankan adalah sebesar 2,05 dari skala 5,00. Semakin kecil nilai yang dipeloreh menunjukan kinerja yang bagus dalam hal tata kelola. Data tersebut diperoleh dari 90 bank yang mengirimkan laporan assessment, meskipun 2,05 masih dalam kriteria baik, tetapi selama 10 tahun terakhir kondisi tidak stabil dan cederung memburuk dikarenakan tren negatif kembali lagi dan mencapai puncaknya pada 2015. Pada periode itu tantangan dunia perbankan memang tergolong berat. Lebih lanjut LPPI akan melakukan studi faktor penyebab penurunan tata kelola perusahaan yang baik sepanjang 10 tahun terakhir. Lando menangkap, untuk bank kecil, pemangku kepentingan terlampau dominan, sehingga tidak terlalu serius menerapkan standar GCG. Hal ini membuat komisaris utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hartadi Sarwono mengatakan hal tersebut perlu jadi perhatian otoritas. Indonesia saat ini tengah memasuki revolusi industri keempat. Risiko semakin besar. Banyak hal yang berubah. Kalau secara fundamental [GCG] memburuk, akan sulit ke depannya. (www.bisnis.com, Rabu, 1 agustus 2018 02:00 WIB | Diakses tanggal 14 Juni 2020, 18.00 WIB).

Harga saham bukopin turun 51,79% sepanjang tahun 2018. KB Kookmin Bank, perusahaan keuangan asal Korea Selatan, mengalami kehilangan nilai (potential loss) sekitar Rp 737,28 miliar atas investasi yang ditanam di PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). Meski demikian, sebagai investor strategis di Bukopin kerugian tersebut hanya di atas buku, karena Kookmin Bank berkomitmen untuk menggenggam saham BBKP untuk jangka panjang. Kerugian potensial tersebut dihitung dari nilai beli saham saat Penawaran Umum Terbatas IV (Rights Issue) yang dilakukan pada Juli lalu. Pada saat itu, Kookmin Bank membeli saham baru yang diterbitkan perseroan pada harga Rp 570/saham dan total nilai pembelian sebanyak 2,46 miliar saham tersebut mencapai Rp 1,46 triliun.

Pada saat mengeksekusi rights issue tersebut, harga saham BBKP berada pada level Rp 340, sehingga Kookmin membeli dengan harga cukup premium. setelah transaksi tersebut selesai harga saham BBKP terus mengalami koreksi. Jika dihitung per hari ini, pada harga saham Rp 282/saham, maka nilai kepemilikan Koomin pada BBKP senilai Rp 712 miliar, atau berkurang lebih dari 50,53% dari harga eksekusi rights issue. Bila dihitung secara year-to-date, harga saham BBKP pada hari ini telah turun 51,79% dari posisi awal tahun Rp 585 per saham. Harga buku atau price to book value (PBV) Bukopin pada level 0,4 kali, jauh lebih rendah dari rata-rata industri yang berada pada di atas 1,6 kali.

Hal ini mencerminkan harga saham BBKP cenderung lebih murah dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan ataupun bank lainnya. Hingga berita ini dinaikkan Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rahmansyah Gindo tidak merespons permohonan komentar dari CNBC Indonesia yang disampaikan layanan perpesanan WhatsApp. Setelah proses rights issue, komposisi pemegang saham Bank Bukopin menjadi Bosowa Corporindo (23,4%), KB Kookmin Bank (22,0%), Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia/KOPELINDO (12,4%), Negara RI (8,9%), dan Publik (33,3%). Pasca masuknya Kookmin sebagai pemegang saham akan dilakukan sinergi terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Digital Banking, dan Manajemen Risiko. Koomin Bank merupakan pemegang saham baru di

Bank Bukopin dengan porsi sebesar 22% Direktur Keuangan Bukopin Rachmat Kaimuddin pernah mengatakan Bukopin akan segera bertemu dengan pihak Kookmin Bank dalam membahas sinergi usaha antara kedua belah pihak. Kookmin Bank merupakan salah satu bank terbesar di Korea yang fokus ke perbankan ritel, termasuk KPR dan digital banking.

Dikutip dari Kantor Berita Yonhap, seusai mengakuisisi 22% saham Bukopin, Kookmin Bank menyatakan akan membantu Bukopin untuk meningkatkan operasinya dalam KPR, perbankan digital dan manajemen risiko. Kookmin Bank juga baru saja meluncurkan produk remitansi dari Korea ke Indonesia dengan target individual dan korporasi. Dikutip dari Pulse, media online asal Korea, produk ini diluncurkan pada 20 Agustus lalu. Dengan produk ini maka, remitansi bisa dilakukan dengan menukarkan Won langsung ke Rupiah, tanpa harus menukarkan ke Dolar Amerika Serikat yang selama ini dilakukan. Saat ini ada sekitar 41.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Korea dan merupakan salah satu pasar terbesar dari remitansi Korea. (www.cnbcindonesia.com, tanggal 07 Desember 2018 | diakses 24 juni 2020).

Fenomena selanjutanya, Pada Laporan Keuangan 2017 disebutkan di bagian Penyajian Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian, bahwa koreksi laporan keuangan 2016 dan 2015 dilakukan karena telah terjadikesalahan penyajian pada dua hal berikut: Piutang kartu kredit Bank yang disebabkan oleh modifikasi data kartu kredit tertentu, dan pembiayaan/piutang syariah BSB terkait dengan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Dalam suratnya kepada BEI, Manajemen menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Bukopin. Berikut ini summary-nya:

Permasalahan pada kartu kredit karena terdapat penjurnalan transaksi abnormal kartu kredit yang dihasilkan oleh sistem yang tidak sesuai dengam standar akuntansi serta ketentuan internal perusahaan. Tidak terdapat aliran dana dari penjurnalan transaksi abnormal ini. Sedangkan permasalahan jasa

pembiayaan/piutang karena terdapat penyesuaian kualitas pembiayaan. dan berdampak pada pementukan cadangan (CKPN) di perushaan anak yaitu Bank Syariah Bukopin (BSP).

Fenomena selanjutnya, pada tahun 2017 KPK menjadwalkan pemeriksaan Komisaris PT Buana Finance Tbk, Tjan Soen Eng. Pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) untuk Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Tjan Soen Eng diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Diketahui Tjan Soen Eng ditetapkan sebagai komisaris perseroan sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 45 tanggal 19 Juli 2017.

PT Buana Finance merupakan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990 dengan fokus usaha di segmen leasing dan pembiayaan konsumen. Pemegang saham mayoritas PT Buana Finance adalah PT Sari Dasa Karsa, sebanyak 67.6 persen, per 31 Juli 2017. PT Sari Dasa Karsa juga tercatat memiliki saham di PT Bank UOB Indonesia, yang dulunya merupakan Bank Buana. Selain itu Tjan Soen Eng juga menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Asuransi Bina Dana Arta atau ABDA. Belum diketahui pasti kaitan Tjan Soen Eng dengan Syafruddin maupun Sjamsul Nursalim. Dalam kasus ini, berdasarkan hasil audit investigatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah kerugian negara mencapai sebesar Rp4,58 triliun.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan masih menjadi suatu sarana kegiatan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan perbankan memiliki fungsi yang strategis yaitu media yang dipergunakan masyarakat untuk menghimpun maupun menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Maka dari itu,

perbankan dituntut untuk memiliki kinerja yang selalu baik, agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta dapat menjaga eksistensinya agar perusahaan perbankan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan perbankan lainnya. Transparasi dari lembaga perbankan baik dalam segi laporan keuangan maupun keadaan kesehatan bank yang dipublikasikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Kesehatan bank adalah hal yang penting, sama halnya manusia yang menjaga kesehatannya agar tetap prima. Perbankan juga harus memiliki kesehatan yang prima dalam hal melayani para nasabahnya karena bank yang memiliki kesehatan yang buruk akan berakibat membahayakan bagi diri sendiri maupun pihak lain yang terkait dan berimbas pada pemilik dana yang dapat menarik dana yang dimilikinya kapan saja. Perbankan sekarang sudah dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan standar yang ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terkait penilaian kesehatan bank harus membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala dalam suatu periode tertentu mengenai seluruh aktifitasnya. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank dan akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Kinerja keuangan bank yang baik akan mencerminkan kondisi kesehatan yang dimilik oleh bank dan mampu menarik minat dan kepercayaan dari pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari pengalaman krisis keuangan global telah mendorong perlunya meningkatkan *good corporate goverment* agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan dari awal, melakukan tindak lanjut perbaikan dengan tepat dan lebih cepat, serta menerapkan *good corporate goverment* yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Perusahaan yang dapat menjalankan dan meberikan informasi GCG yang baik merupakan hal yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan.

Dengan menerapkan GCG diharapkan dapat menjaga keseimbangan hal dan kewajiban antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan

stakeholders lainnya agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder.* Karena dalam perusahaan, pada kegiatan operasionalnya tidak dapat hidup sendiri melainkan terkait dalam lingkungan sekitarnya (Alfinur, 2016). Perusahaan membutuhkan pihak atau kelompok untuk memonitor implementasi kebijakan direksi dalam menerapkan *good corporate governence,* salah satunya adalah komisaris independen yang merupakan pemegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan kinerja para manajer sudah benar-benar meningkat sebagai bagian untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebab, komisaris independen merupakan inti dari corporate governence yang memiliki tugas dalam menjamin pelaksaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam hal mengelola perusahaan adanya kewajiban terlaksannya akuntabilitas.

Selain komisaris independen, pengawasan internal perusahaan juga dilakukan oleh komite audit dan juga sembagai perantara antara pemegang saham dan dewan komisaris dalam kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajeman serta auditor internal dan eksternal. Dalam hal mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi (asimetri informasi) yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, sehingga menimbulkan penurunan nilai dari perusahaan merupakan prinsip dari komite audit. Menurut (Saputra & Wardhani, 2017) mengatakan adanya hubungan positif antara banyaknya pertemuan dari komite audit dengan pengungkapan modal intelektual, struktur modal dan pengungkapan modal rasional maka komite audit memiliki tugas yang harus dijalankan yaitu saat adannya pertemuan perundingan yang diikuti oleh dewan komisaris, direksi dan para komite beserta auditor eksternal perusahaan, komite audit harus hadir dalam rapat tersebut.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam peran yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kualitas audit. Namun, kualitas audit bukanlah merupakan sesuatu yang dapat diamati secara langsung. Pada persepsinya kualitas audit akan selalu berkaitan dengan nama auditor dan nama baik Kantor Akuntan Publik akan menjadi gambaran yang paling penting baik secara teori maupun empiris, karena ukuran

kualitas audit dilihat menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik. Karena pada dasarnya, audit merupakan proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antar manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan jasa pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para auditor dalam proses audit. Dalam rangka mencegah dan mendeteksi potensi-potensi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen maka diperlukan audit dan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH KOMISARIS INDENPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2015-2019 ".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah secara simultan komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fungsi audit operasional, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan

1. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit terhadap nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik itu secara teoritis maupun praktis untuk semua pihak yang memiliki keterlibatan dengan penelitian ini. Berikut kegunaan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan wawasan untuk para akademik sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya, dan juga untuk memberikan investor pengetahuan yang lebih luas dalam memahami nilai perusahaan terutama tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi media pustaka, sarana acuan bagi pihak yang memiliki kepentingan seperti akademisi dan masyarakat. Begitupun untuk perusahaan diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan berkualitas untuk memahami pengaruh dari komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.